

Apakah Agunan Mempengaruhi Akses dan Perilaku Pembayaran Pinjaman UMKM? (Kasus Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM) = Do Collateral Affect Access and Repayment Loan Behaviour : Case of Cooperative and MSME Revolving Fund Management Institution

Lanang Tanu Prihantoro, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20502014&lokasi=lokal>

Abstrak

Kurang tertibnya penyaluran dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM, membuat pemerintah mengalihkan pengelolaannya melalui satker Badan Layanan Umum (BLU), yaitu LPDB-KUMKM. Dalam perjalanannya demi mewujudkan akuntabilitas pembiayaan dan profesionalisme, LPDB-KUMKM menyempurnakan pola penyaluran dana bergulir melalui beberapa regulasi. Kebijakan yang paling mendasar adalah penerapan agunan dan tarif layanan, dimana dana bergulir sebelumnya tidak membebankan bunga atau tarif layanan maupun agunan sebagai persyaratan permohonan pinjaman. Tarif layanan lebih dahulu dilaksanakan, dan pada dasarnya juga bukan merupakan kendala bagi UMKM karena nilainya yang lebih rendah dari suku bunga perbankan. Namun demikian, Non Performing Loan (NPL) dari peminjam atau mitra dirasa masih tinggi, oleh sebab itu kemudian LPDB-KUMKM menerapkan agunan sebagai salah satu persyaratan pinjaman. Berkaca pada bisnis pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan agunan memang efektif untuk menekan tingkat gagal bayar dari para peminjam. Namun di sisi yang lain hal ini akan berdampak kepada aksesibilitas UMKM terhadap permodalan dan akan berdampak juga kepada perilaku pembayaran pinjaman dari UMKM. Studi ini menggunakan data perkembangan pinjaman mitra LPDB-KUMKM dari awal hingga tahun 2018. Model Regresi Logit digunakan untuk mendukung analisis, hasil studi ini menunjukkan pada kasus LPDB agunan memiliki korelasi negatif terhadap peluang default atau tingkat gagal bayar pinjaman.

.....The lack of orderly distribution of the revolving funds of the Ministry of Cooperatives and SMEs, made the government transfer its management through the Public Service Agency (BLU) satker, the LPDB-KUMKM. In its journey to realize financial accountability and professionalism, LPDB-KUMKM has perfected the pattern of revolving fund distribution through several regulations. The most basic policy is the application of collateral and service tariffs, where the previous revolving fund does not charge interest or service fees or collateral as a condition for loan applications. Service tariffs are implemented first, and in essence are also not an obstacle for MSMEs because of their lower value than bank interest rates. However, the Non Performing Loan (NPL) from borrowers or partners is still considered high, therefore LPDB-KUMKM then applies collateral as one of the loan requirements. Reflecting on the financing business carried out by collateral banking, it is indeed effective to reduce the default rates of borrowers. But on the other hand this will have an impact on the accessibility of MSMEs to capital and will also affect the behavior of loan payments from MSMEs. This study uses data on the development of LPDB-KUMKM partner loans from the beginning to 2018. The Logit Regression Model is used to support the analysis, the results of this study show that the collateral, in case of LPDB, has a negative correlation with the probability of default or loan default.